

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam penulisan ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul / Tahun Jurnal	Variabel Penelitian	Obyek Penelitian	Hasil
1.	<ul style="list-style-type: none"> • M. Wahyudin Abdullah <p>Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bone / Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. III No. 2 Desember 2017</p>	<p>Dependent : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah • Sistem Informasi Akuntansi <p>Moderasi : Kompetensi SDM</p>	Kepala Departemen, Sekretaris, Bendahara, dan staf keuangan Kabupaten Bone	Kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Nurhasanah • Firmansyah • Kurnia Sari <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan / Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018</p>	<p>Dependent : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah • Pengendalian Internal • Kompetensi SDM 	Staf atau Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatra Selatan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Pengendalian Internal

dilanjutkan ...

lanjutan ...

				berpengaruh Negativ terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Umar Sako • Felmi D. Lantowa <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo / Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 1, Januari 2018</p>	<p>Dependent : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Independent : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo	Penerapan SAP berpengaruh Positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Astika Rahmawati • I Wayan Mustika • Lilik Handaya Eka <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan / Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018</p>	<p>Dependent : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Independent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Sistem Pengendalian Intern 	Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tangerang Selatan	Standar Akuntansi Pemerintah, Utilisasi Teknologi Informasi, Dan Sistem Kontrol Intern Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

lanjutan ...

5.	<ul style="list-style-type: none"> • Nikke Yusnita Mahardini • Ade Miranti <p>Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten / Jurnal Akuntansi, Volume 5 No. 1, Januari 2018</p>	<p>Dependent : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Independent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah • Kompetensi SDM 	<p>Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng</p>	<p>Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>
----	---	--	---	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dengan penelitian M. Wahyudin Abdullah (2017) , Nurhasanah, Firmansyah, dan Kurnia Sari (2018) , Umar Sako dan Felmi D. Lantowa (2018) , Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) , Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018) yang masing-masing penelitian meneliti adanya pengaruh penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

Penelitian memiliki perbedaan yang terletak pada pemilihan objek penelitian terdahulu, diantaranya M. Wahyudin Abdullah (2017) pada Kepala Departemen, Sekretaris, Bendahara, dan staf keuangan Kabupaten Bone , Nurhasanah, Firmansyah, dan Kurnia Sari (2018) pada Staf atau Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatra Selatan , Umar Sako dan Felmi D. Lantowa (2018) pada Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo , Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) pada Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tangerang Selatan , dan Nikke

Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018) pada Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Selain pada objek penelitian terdapat penambahan variabel pada penelitian terdahulu, diantaranya M. Wahyudin Abdullah (2017) menggunakan SDM sebagai variabel moderasi , Nurhasanah, Firmansyah, dan Kurnia Sari (2018) menggunakan Pengendalian Internal sebagai variabel independent lain , Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) menggunakan Utilisasi Teknologi Informasi, dan Sistem Kontrol Intern sebagai variabel independent lain , Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018) menggunakan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel independent lain.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip akuntansi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dirasakan wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan maksud menyelenggarakan akuntansi pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.

SAP dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang mana SAP akan memuat judul, nomor, dan tanggal efektif. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menjadi pelengkap SAP.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan bertujuan sebagai ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi bagi pembuat standar dalam melaksanakan tugasnya, serta pengguna laporan keuangan harus paham dalam menyusun standar tentang laporan keuangan yang disajikan, pelaporan keuangan dan penyelenggara akuntansi.

Prinsip yang dipakai dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, ditujukan pada pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan entitas wajib menyajikan pelaporan keuangan yang mengharuskannya menggunakan basis kas.

Basis akrual bagi LO mengartikan pengakuan pendapatan terjadi saat hak untuk mendapatkan pendapatan telah dipenuhi meskipun pada Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau oleh entitas pelaporan belum menerima kas, dan pengakuan beban pada saat kewajiban berdampak pada penurunan nilai kekayaan bersih terpenuhi meskipun

Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau entitas pelaporan belum mengeluarkan kas.

Penyajian LO juga memuat tentang pendapatan yang berasal dari bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat dengan jumlah harga perolehan dari pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau besarnya sama dengan nilai wajar dari imbalan (*consideration*) pada saat memperoleh aset tersebut. Pencatatan kewajiban besarnya merupakan jumlah kas dan setara kas yang diinginkan akan membayar untuk mencukupi kewajiban di masa depan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*Realization*)

Untuk pemerintah, pendapatan yang ada dengan basis kas telah diotorisasikan melewati anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan dimanfaatkan dalam periode yang bersangkutan untuk membayar utang dan belanja. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran adalah pelaporan yang wajib dibuat, maka akan mengakui pendapatan atau belanja yang menggunakan basis kas setelah diotorisasi melewati anggaran dan kas telah ditambah atau dikurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi ditujukan untuk penyajian transaksi serta peristiwa lain dengan wajar, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut membutuhkan pencatatan dan penyajian serupa dengan substansi dan realitas ekonomi,

dan tidak hanya berdasarkan aspek formalitas. Jika tidak konsisten atau berbeda dari substansi transaksi atau peristiwa lain pada aspek formalitasnya, maka pengungkapan harus jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Tujuan adanya periodisitas ini agar dapat mengukur kinerja suatu entitas dan menentukan penepatan sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas membutuhkan pembagian menjadi periode-periode laporan.

Penggunaan periode terutama adalah tahunan, namun disarankan juga penggunaan periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Penerapan perlakuan akuntansi sama pada setiap kejadian yang mirip dari periode ke periode bagi suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Namun tidak berarti tidak boleh mengalami perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Pengguna yang menggunakan laporan keuangan akan mendapatkan informasi secara lengkap dari penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan. Informasi tersebut dapat terletak pada pelaporan keuangan yang terdapat pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Penyajian wajar dalam laporan keuangan terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk penyajian wajar, perlu mempertimbangkan faktor ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan perlu mempertimbangkan ketidakpastian tersebut dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP, merupakan SAP yang memuat judul, nomor, dan tanggal efektif, sebagai berikut :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Standar ini bertujuan mengatur penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial statements*) dengan maksud untuk keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas meningkat. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk pengguna laporan dalam memenuhi kebutuhannya termasuk lembaga legislatif yang telah disahkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Standar ini bertujuan untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan ditetapkannya dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah. Selain itu tujuan pelaporan realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Tingkat tercapainya target dapat dilihat dari keterbandingan antara anggaran dan realisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana legislatif dan eksekutif telah menyepakatinya.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Standar ini bertujuan untuk menyediakan informasi historis tentang perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan melalui pengklasifikasian arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Untuk tujuan pelaporan arus kas yaitu didalamnya memuat tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi yang disajikan tersebut sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan mengambil keputusan.

4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Standar ini bertujuan untuk menyajikan dan mengungkapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan yaitu untuk

transparansi dan menyediakan pemahaman yang lebih pada informasi keuangan pemerintah.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan terhadap akuntansi persediaan yang dirasa memerlukan penyajian dalam suatu laporan keuangan. Standar ini menyajikan keseluruhan persediaan dalam laporan keuangan yang bertujuan umum.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan mengungkapkan informasi penting lainnya yang wajib disajikan kedalam laporan keuangan. Penyajian seluruh investasi pemerintah harus disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan umum sehingga dapat menyusun dan menyajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar ini mengatur investasi pada saat pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Standar ini bertujuan untuk konstruksi dalam pengerjaan bagaimana mengaturnya dalam perlakuan akuntansinya.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap kewajiban seperti pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan pada kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan

Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang mengalami perubahan, berubahnya estimasi akuntansi, dan tidak dilanjutkannya operasi.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Standar ini bertujuan untuk mengatur susunan laporan keuangan konsolidasian pada bagian pemerintahan untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial statements*) demi peningkatan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

Standar ini bertujuan untuk penetapan dasar penyajian Laporan Operasional bagi pemerintah agar dapat memenuhi tujuan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memaparkan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang termuat dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Menyeluruhnya instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik dan sesuai sehingga akan berdampak pada pelaporan keuangan mengandung informasi yang andal dan lengkap bagi semua pihak. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku kini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki pedoman dengan ditetapkannya SAP.

2.2.2 Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2013:2) “Laporan keuangan termasuk dalam informasi yang mengilustrasikan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan informasi itu dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan”. Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2) “Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi antara data atau aktivitas keuangan dengan pihak yang berkepentingan.

2.2.2.1 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen SAP yang terdapat dalam laporan keuangan tersusun dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memuat sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang ditangani oleh pemerintah pusat atau daerah, hal ini digambarkan dalam perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Perbandingan yang memuat informasi mengenai naik atau turunnya Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Memaparkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu neraca tersebut dikeluarkan.

d. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi dapat menambah ekuitas dan penggunaannya yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Menggambarkan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dengan memuat saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Didalamnya menyajikan sedikitnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit-LO pada periode berjalan dan koreksi yang dapat menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari perubahan aturan Keuangan yang berdampak pada kumulatif.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan pemerintah harus bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang disajikan pada pengguna, antara lain :

- a. Memuat informasi tentang sumber, alokasi dan sumber daya keuangan yang digunakan

- b. Berisikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran
- c. Memuat informasi jumlah sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam operasional entitas pelaporan serta hasil yang dapat dicapai
- d. Memuat informasi tentang cara entitas pelaporan membiayai kegiatannya dan kebutuhan kasnya dapat tercukupi
- e. Memuat informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berhubungan dengan sumber penerimaannya, termasuk didalamnya yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman
- f. Memuat informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, yang diakibatkan kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

Demi mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan dilengkapi informasi mengenai sumber serta pemanfaatan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.2.2.3 Peran Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan keseluruhan transaksi dalam suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan usaha yang telah dijalankan

serta hasil yang mampu dicapai dalam melaksanakan kegiatannya secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan yang dimaksudkan untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*).

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penilaian kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan mengawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal yang dimanfaatkan agar dapat mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan melalui laporan keuangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan dari disusunnya laporan keuangan agar dapat menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dijalankan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penggunaan laporan keuangan adalah untuk mengetahui nilai pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan mengetahui ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kewajiban setiap entitas pelaporan yaitu melaporkan usaha yang telah dijalankan serta pencapaian hasil dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan demi kepentingan :

a. Akuntabilitas

Pengelolaan sumber daya dapat dipertanggung jawabkan serta melaksanakan kebijakan yang telah diamanatkan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga berdampak pada fungsi yang dipermudah, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memaparkan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hak yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Pengguna dapat mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan generasi yang akan datang diasumsikan akan terdampak beban pengeluaran tersebut atau tidak.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Agar dapat memenuhi tujuannya karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah perwujudan informasi akuntansi yang diukur secara normatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP, terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang diinginkan maka karakteristik tersebut dibutuhkan sebagai persyaratan normatif, antara lain :

1. Relevan

Suatu laporan keuangan bisa relevan jika memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta hasil evaluasi yang telah dibuat di masa lalu dapat ditegaskan atau dikoreksi. Sehingga, relevannya suatu informasi laporan keuangan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya.

Informasi yang relevan, meliputi :

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi yang termuat didalamnya dapat digunakan untuk menegaskan atau mengoreksi harapan para pengguna di masa lalu.

b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini maka informasi dapat digunakan pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga akan berpengaruh dan berguna dalam mengambil suatu keputusan.

2. Andal

Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, yang hanya akan menyajikan kebenaran secara jujur, serta dapat diverifikasi. Suatu informasi yang relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat menyesatkan untuk menggunakan informasi tersebut.

Informasi yang andal terdiri dari :

a. Penyajian Jujur

Informasi disajikan secara jujur baik transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan memungkinkan untuk diuji, dan apabila hasilnya tetap dengan penyimpulan yang tidak berbeda jauh ketika

dilakukan pengujian yang dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda.

c. Netralitas

Informasi ditujukan untuk kebutuhan umum dan bukan pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan jika kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun selalu diterapkan oleh entitas. Perbandingan secara eksternal dilakukan jika menerapkan kebijakan akuntansi yang sama pada setiap entitas yang dibandingkan.

4. Dapat dipahami

Informasi disajikan dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna. Para pengguna dianggap berpengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta pentingnya keinginan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.4 Sumber Daya Manusia

Menurut Sonny Sumarsono (2003) Sumber Daya Manusia (Human Resources) memiliki dua arti yang berbeda, yaitu pertama, SDM merupakan

suatu upaya bekerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain SDM adalah kualitas upaya yang dilakukan seorang individu dengan batas waktu yang telah ditentukan supaya menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua SDM terkait dengan manusia yang mampu bekerja, kemudian dari usaha kerjanya menghasilkan jasa. Dapat bekerja berarti sanggup melaksanakan kegiatan bernilai ekonomis atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa.

Aktivitas Sumber Daya Manusia adalah kebijakan formal SDM yang telah dikembangkan dan diterapkan dengan cara yang benar dalam suatu praktik-praktik pengawasan setiap hari. Ketika suatu organisasi telah memahami, menciptakan, mengkoordinasikan, menyetarakan, dan mengintegrasikan semua kebijakan dan praktik-praktiknya secara sistematis, organisasi tersebut telah menciptakan suatu sistem manajemen sumber daya manusia. Suatu sistem manajemen SDM yang efektif akan dilandasi oleh pemahaman mengenai cara sebuah pekerjaan dialokasikan dalam tugas, kemampuan yang dibutuhkan oleh SDM yang melakukannya, dan suatu tinjauan jangka panjang tentang kejadian dimasa depan.

2.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi (*Competency*) adalah suatu pola pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan karakteristik lain yang dapat diukur dan dibutuhkan oleh setiap individu agar dapat melaksanakan peran

pekerjaan atau suatu fungsi pekerjaan dengan baik. Suatu pendekatan percontohan kompetensi lebih menekankan pada sebuah pendekatan karakteristik individu yang berkaitan dengan kinerja yang efektif dan kecakapan individu pada setiap kompetensi yang dimiliki.

Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dapat dinilai dalam pelaksanaan fungsi, seperti akuntansi, yang dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Deskripsi jabatan merupakan tanggungjawab yang dapat dilihat dari dalam. Deskripsi jabatan mendasari pelaksanaan baik tidaknya suatu tugas. Sumberdaya tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya kejelasan dalam deskripsi jabatan. Kompetensi suatu sumberdaya terlihat dari latar belakang pendidikan, keikutsertaan dalam suatu pelatihan, dan keterampilan yang dinilai dari tugas yang dilaksanakannya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dapat dinilai dari :

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Termasuk dalam informasi yang telah diketahui dan dimengerti oleh seseorang, sehingga dimanfaatkan untuk mendukung dalam menghadapi kegiatan atau kerjaan yang ditangani oleh seseorang.

b. Keterampilan (*Skill*)

Merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatannya.

c. Perilaku (Attitude)

Merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipengaruhi oleh faktor Adat kebiasaan, Adat Budaya, Etika, Emosi, dan Sikap

d. Pelatihan (Training)

Merupakan pendidikan singkat untuk mempelajari suatu pengetahuan dan keterampilan untuk suatu tujuan tertentu.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dirasakan penting karena fungsi dari laporan keuangan itu sendiri yang dapat dijadikan acuan pertanggungjawaban dan sarana transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan.

Adanya pengaruh hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sako dan Lantowa (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo.

2.3.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating

Kompetensi Sumber Daya Manusia dirasakan memiliki peran yang cukup penting dalam memahami Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga akan berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan didukung adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni maka akan sejalan dengan kualitas pelaporan yang baik dan dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Adanya pengaruh hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang merupakan Variabel Moderasi antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Abdullah (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial interaksi antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan variabel moderating.

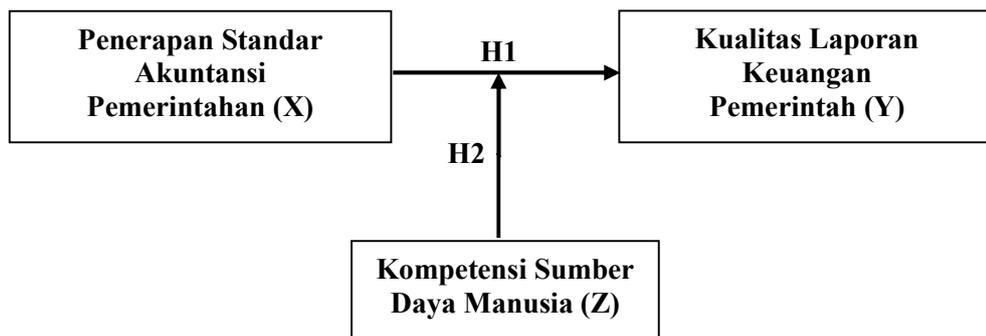
2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dibuat untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Dengan didasari rumusan masalah,

landasan teori dan review dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat adanya pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Abdullah (2017) menyebutkan bahwa secara signifikan memoderasi hubungan antara pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan dasar penelitian sebelumnya tersebut diatas penelitian ini ingin meneliti adanya hubungan yang terjadi antar variabel, yang dapat terlihat dari kerangka penelitian dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran diatas dapat menggambarkan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (H1) dan menggambarkan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating (H2).

2.5 Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating.